

**ANALISA PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENJUALAN TAK BERIZIN DITINJAU DARI
KONSEP *ADMINISTRATIVE PENAL LAW***

Cindy Claudia

1587033

ABSTRAK

Transaksi jual - beli pada era modern seperti saat ini dapat dilakukan tanpa harus tatap muka dan dapat dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu. Teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual - beli. Transaksi jual beli melalui media *online* dinilai cukup efektif. Transaksi jual - beli dengan mudah dapat dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan *platform* jual - beli, *website*, dan media sosial sebagai alat untuk mengiklankan produk dan menjual produk. Namun tidak semua produk dapat dijual secara *online* dengan memanfaatkan *platform* jual - beli, *website*, media sosial seperti minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah barang yang distribusinya diawasi dan dibatasi oleh Pemerintah, sehingga memerlukan mekanisme tertentu dalam penjualannya. Penulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengatur perizinan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* dan akibat hukum pidana yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara *online* ditinjau dari konsep *Administrative Penal Law*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi literatur perundang - undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan minuman beralkohol secara *online* belum diatur secara khusus mengenai perizinannya. Namun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sanksi Pidana dapat dikenakan terhadap tindakan pelanggaran administratif seperti menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin, menjual minuman beralkohol palsu, menjual minuman beralkohol tanpa berpita cukai atau berpita cukai palsu. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 106 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 54 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 204 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dan Pasal 386 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : perizinan, penjualan *online*, minuman beralkohol, *Administrative Penal Law*

**ANALYSIS OF THE REGULATIONS ABOUT LICENSING OF ONLINE ALCOHOL
DRINKS TRADE AND THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BUSINESSMEN WHO
CONDUCT UNDER LISENCE TRADES IN TERMS OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW
CONCEPT**

Cindy Claudia

1587033

ABSTRACT

A trade transaction in this modern era can be performed without meeting face to face and can be done without any barrier caused by time and space. Technologies keep being more and more sophisticated and help people in making trade transactions. Trade transactions through online media is considered to be effective. Trade transactions can be easily conducted by online, utilizing sales and purchase platform, website, and social media as tools to promote the products and sell them. However, not all products can be sold online by utilizing sales and purchase platform, website, and social media such as alcohol drinks. "Alcohol drinks" is a commodity which the distribution is supervised and restricted by the government, therefore specific mechanisms are needed in trading it. This research explains how the regulations in Indonesia regulate licensing of online alcohol drinks trade and the criminal responsibility for businessmen who conduct the trades in terms of administrative penal law concept.

In this research the author used normative juridical method. The type of this research is Qualitative Research with descriptive analytical character. The approaches in this research are legislative approach and case approach. The data collection technique in this research is the literature study of the provisions concerned.

The result of this research shows that the license of online trading of alcohol drinks has not been specifically regulated. However the businessmen in conducting the trade of alcohol drinks have to obey the Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Regulation of Head of National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016 concerning Safety and Quality Standards of Alcohol Drinks, Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision on Alcoholic Drinks, Regulation of the Minister of Trade Number 20 of 2014 concerning Alcohol Drinks Control, Distribution, and Trades. Criminal sanctions can be imposed to administrative violations such as selling alcohol drinks without required licenses, selling counterfeit alcohol drinks, selling alcohol drinks without an excise tape or with a counterfeit excise tape. The sanctions mentioned above are regulated in Article 106 Law of Republic Indonesia Number 7 of 2014 on Trade, Article 54 Law Number 39 of 2007 concerning Excise, Article 204 Indonesian Civil Code, and Article 385 Indonesian Penal Code.

Keywords: license, online trading, alcohol drinks, Aministrative Penal Law

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pernyataan Publikasi	iii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iv
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
1. Kerangka Teoritis	13
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Jenis Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknis Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DI INDONESIA

A. Aspek Hukum Privat Dalam Kegiatan Jual Beli Minuman Beralkohol	
1. Perjanjian Jual Beli Antara Para Pihak yang Terlibat dalam Pendistribusian	28
2. Pengaturan Distribusi Minuman Beralkohol Dan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Distribusi	34
B. Aspek Hukum Perizinan Dalam Kegiatan Jual Beli Minuman Beralkohol	
1. Tinjauan Perizinan Dalam Sistem Hukum Indonesia	40
2. Persyaratan atau Ketentuan Perizinan Pelaku Usaha atau Penjual Minuman Beralkohol	43
3. Pengaturan Kegiatan Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Undang Undang Informasi Dana Transaksi Elektronik	53

BAB III ASPEK HUKUM PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF *ADMINISTRATIVE PENAL LAW*

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	
1. Pengertian dan Asas – Asas Hukum Pidana	58
a. Pengertian Hukum Pidana	58
b. Asas – Asas Hukum Pidana	60
2. Tujuan Hukum Pidana	65
3. Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik	66
4. Delik	68
a. Pengertian Delik	68
b. Unsur – Unsur Delik	70
5. Syarat Pidanaan	72
a. Syarat yang Melekat Pada Perbuatan	73

b. Syarat Subjektif atau Syarat yang Melekat Pada Orang	73
6. Sanksi Pidana	74
a. Pidana Pokok	75
1) Pidana Mati	75
2) Pidana Penjara	76
3) Pidana Kurungan	77
4) Pidana Denda	77
b. Pidana Tambahan	78
1) Pencabutan Beberapa Hak Tertentu	78
2) Perampasan Barang – Barang Tertentu	79
3) Pengumuman Putusan Hakim	80
B. Perkembangan Konsep <i>Administrative Penal Law</i>	
1. Hukum Pidana Sebagai Sarana Perlindungan Kepentingan Publik	81
2. Hukum Pidana Administratif	83
C. Pelanggaran Ketentuan Administratif dan Ketentuan Pidana Dalam Penjualan Minuman Beralkohol	87

BAB IV ANALISIS PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENJUALAN TAK BERIZIN DITINJAU DARI KONSEP *ADMINISTRATIVE PENAL LAW*

A. Analisis Pengaturan Perizinan Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Secara <i>Offline</i>	91
B. Analisis Tindakan Penjualan Minuman Beralkohol Secara <i>Online</i> Dipandang Dari Perspektif <i>Administrative Penal Law</i>	111

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	126
B. Saran	128

1. Bagi Pemerintah	129
2. Bagi Pelaku Usaha	129
3. Bagi Masyarakat	129
Daftar Pustaka	129
Curriculum Vitae	133

